



PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
**INSPEKTORAT**

**MANAJEMEN RISIKO**  
INPEKTORAT KOTA DENPASAR  
TAHUN 2024

*"Nasudhaira Kutumbakam"*

## **MANAJEMEN RISIKO**

### **INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2024**

#### **A. Pendahuluan**

Penilaian risiko merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penilaian ini dilaksanakan untuk meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Daerah kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan sesuai visi pembangunan daerah yaitu Denpasar Kota Berbudaya dilandasi Tri Hita Karana, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, sehingga diperlukan pengaturan untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam mengelola risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### **B. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### **C. Tujuan**

Tujuan penyusunan Penilaian Risiko Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sampai tingkat kegiatan dan program Inspektorat Kota Denpasar.
2. Pemetaan risiko pada tingkat kegiatan dan program pada penyelenggaraan di bidang pengawasan.

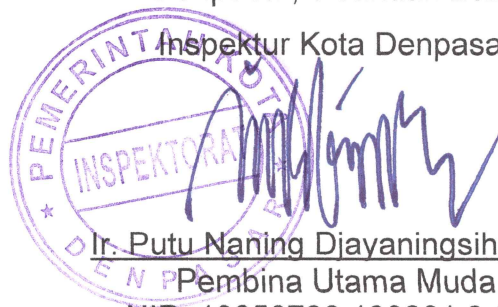
3. Sebagai media akuntabilitas pelaporan dan bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Register Risiko di lingkungan Inspektorat Kota Denpasar.

#### **D. Ruang Lingkup**

1. Periode pelaporan Tahun 2024.
2. Laporan meliputi Register Risiko di lingkungan Inspektorat Kota Denpasar.

Denpasar, 5 Januari 2024

Inspektur Kota Denpasar



Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650726 199201 2 001


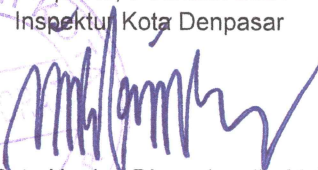
Form 2.b  
Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2024	
Periode yang Dinilai	:	RPJMD 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Pengawasan Pemerintah	
OPD yang Dinilai	:	Inspektorat	
Sumber Data	Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026		
Tujuan Strategis	Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		
Sasaran Strategis	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Level Kapabilitas APIP	Level 3
	2	Level Maturitas SPIP	Level 3
	3	Persentase OPD yang didampingi/yang mendapat pendampingan	70%
Program			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		
	Sasaran Strategis: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		
	IKU Strategis: 1. Level Kapabilitas APIP 2. Level Maturitas SPIP 3. Persentase OPD yang yang didampingi/yang mendapat pendampingan		
	Program: 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <p>Denpasar, 5 Januari 2024 Inspektur Kota Denpasar</p>  <p><u>Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si</u> Pembina Utama Muda NIP. 19650726 199201 2 001</p> </div> </div>			

Form 2.c  
Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2024	
Periode yang Dinilai	:	RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Pengawasan Pemerintahan	
OPD yang Dinilai	:	Inspektorat	
Sumber Data	Renja Inspektorat Tahun 2024		
Tujuan Strategis	Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		
Program Inspektorat Kota Denpasar (Renja tahun 2024)	<b>1. Program Penyelenggaraan Pengawasan</b> 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>1 Kegiatan</b>
	2	<b>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>1 Laporan</b>
	3	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	1 Kegiatan
	4	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	36 OPD
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program: 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi  Kegiatan: 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 4. Pendampingan dan Asistensi  Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 3. Terlaksananya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi 4. Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah		
 <p style="text-align: center;">Denpasar, 5 Januari 2024                  Inspektur Kota Denpasar                   Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si                  Pembina Utama Muda                  NIP. 19650726 199201 2 001</p>			

Form 2.c.1  
Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

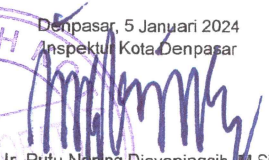
Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2024	
Periode yang Dinilai	:	RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Pengawasan Pemerintahan	
OPD yang Dinilai	:	Inspektorat	
Sumber Data	Renja Inspektorat Tahun 2024		
Tujuan Strategis	Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		
Program Inspektorat Kota Denpasar (Renja tahun 2024)	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan <b>2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1 Kegiatan
	2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan
	<b>3</b>	<b>Terlaksananya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>1 Kegiatan</b>
	<b>4</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>36 OPD</b>
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program: 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi  Kegiatan: 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 4. Pendampingan dan Asistensi  Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 3. Terlaksananya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi 4. Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah		
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <p>Denpasar, 5 Januari 2024</p> <p>Inspektur Kota Denpasar</p>  <p><u>Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si</u> Pembina Utama Muda NIP. 19650726 199201 2 001</p> </div> </div>			

Form 3.a  
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah


Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar									
Nama OPD		: Inspektorat Kota Denpasar									
Tahun Penilaian		: 2024									
Periode yang dinilai		: RPJMD Tahun 2021-2026									
Urusan Pemerintahan		: Unsur Pengawasan Pemerintahan									
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program Unggulan	Indikator Kinerja	Uraian	Risiko		Sebab			C/UC	Dampak	
				Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Tujuan Strategis Pemerintah: Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi										
	Sasaran : Meningkatkan Kapabilitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi										
1	Program: Penyelenggaraan Program Pengawasan	1. Level Kapabilitas APIP 2. Level Maturitas SPIP	Tuntutan Penguatan dan Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Denpasar lebih optimal	RSP.24.35.04.01	Kepala Daerah	Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran penguatan Kapabilitas APIP termasuk sarana dan prasarana pendukung belum optimal	Internal	C	Level Kapabilitas APIP menjadi di level 2	Kepala Daerah dan OPD terkait	
			Tuntutan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang lebih efektif	RSP.24.35.04.02	Kepala Daerah	Kurangnya koordinasi, sosialisasi dan pemahaman OPD terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah	Internal dan Eksternal	C	Level Maturitas SPIP tidak bisa mempertahankan level 3	Kepala Daerah dan OPD terkait	
			Tuntutan untuk mempertahankan Opini BPK (WTP) terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar	RSP.24.35.04.03	Kepala Daerah	Adanya faktor-faktor indikasi terjadinya fraud yang terjadi pada proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Internal dan Eksternal	C	Opini BPK (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar tidak bisa dipertahankan	Kepala Daerah dan OPD terkait	
2	Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Persentase OPD yang mendapat pendampingan Inspektorat	Menurunnya Predikat Reformasi Birokrasi OPD di Pemerintah Kota Denpasar	RSP.24.35.04.04	Kepala Daerah	Masih ada program kerja pada OPD yang belum tepat sasaran, belum inovatif dan kreatif serta adaptif terhadap perubahan di dalam melakukan pelayanan publik.	Internal dan Eksternal	C	tidak bisa dipertahankan Predikat Reformasi Birokrasi minimal BB di Pemerintah Kota Denpasar	Kepala Daerah dan OPD terkait	

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program Unggulan	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelaksanaan SAKIP di lingkup Pemerintah Kota Denpasar belum baik	RSP.24.35.04.05	Kepala Daerah	Kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara belum optimal	Internal dan Eksternal	C	tidak tercapainya hasil evaluasi SAKIP minimal A	Kepala Daerah dan OPD terkait
			Tuntutan untuk menurunkan temuan pada Pemerintah Kota Denpasar	RSP.24.35.04.06	Kepala Daerah	Kurangnya pendampingan dari Inspektorat untuk mencegah terjadinya temuan pada OPD binaan	Internal	C	Tingkat kepatuhan atas perundang-undangan yang berlaku masih rendah	Kepala Daerah dan OPD terkait

Denpasar, 5 Januari 2024  
Inspektur Kota Denpasar



Ir. Putu Nanna Djayaningsih, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650726 199201 2 001




Form 3.b  
Identifikasi Risiko Strategis OPD


Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Denpasar  
 Nama OPD : Inspektorat  
 Tahun Penilaian : 2024  
 Periode yang dinilai : Renstra Tahun 2021 - 2026  
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik  
 Urusan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Pemerintahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik									
	Sasaran: Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi									
1	Program: Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Denpasar	Tuntutan Penguatan dan Pertahanan Level Kapabilitas APIP Inspektorat	RSO.24.35.04.01	Inspektur	Kurangnya SDM APIP yang memadai dan berkompeten serta kurangnya sarana prasarana pendukung pengawasan oleh APIP	Internal	C	Level Kapabilitas APIP Inspektorat menjadi level 2	Kepala Daerah
			Tuntutan pertahanan Level Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kota Denpasar	RSO.24.35.04.02	Inspektur	Kurangnya koordinasi, sosialisasi dan pemahaman OPD terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk belum adanya sistem berbasis teknologi yang mempermudah proses.	Internal dan Eksternal	C	Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kota Denpasar menjadi level 2	Kepala Daerah
			Tuntutan pertahanan nilai pemenuhan MCP Kota Denpasar	RSO.24.35.04.03	Inspektur	Kurangnya koordinasi, sosialisasi dan pemahaman OPD terhadap pemenuhan area MCP.	Internal dan Eksternal	C	Tidak tercapainya nilai pemenuhan MCP Kota Denpasar minimal 80%	Kepala Daerah dan OPD terkait

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Persentase OPD yang didampingi/ yang mendapat pendampingan	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP, Itprov, dan Itko tidak sesuai target.	RSO.24.35.04.04	Inspektur	Kurangnya koordinasi, pemahaman dan komitmen OPD dalam penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP, Itprov, dan Itko	Internal dan Eksternal	C	Tidak tercapainya target penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP, Itprov, dan Itko sebesar 90 %	Kepala Daerah dan OPD terkait
			Kurangnya kualitas Pelaksanaan Benturan Kepentingan dan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	RSO.24.35.04.05	Inspektur	Koordinasi, sosialisasi dan pemahaman OPD terhadap Pelaksanaan Benturan Kepentingan dan Gratifikasi belum optimal.	Internal dan Eksternal	C	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) menjadi rendah yang menggambarkan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi di Kota Denpasar menjadi diragukan	Kepala Daerah dan OPD terkait
			Menurunnya Persentase OPD yang mendapatkan pendampingan Inspektorat	RSO.24.35.04.06	Inspektur	kurangnya tenaga pendamping dari Inspektorat Kota Denpasar	Internal	C	Kurang optimalnya pemenuhan dokumen serta perbaikan hasil evaluasi secara tepat waktu dan tepat sasaran.	OPD yang terkait

Denpasar, 5 Januari 2024  
Inspektur Kota Denpasar

  
Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650726 199201 2 001



Form 3.c  
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Denpasar  
 Nama OPD : Inspektorat  
 Tahun Penilaian : 2024  
 Periode yang dinilai : Renstra Tahun 2021 - 2026  
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik  
 Sasaran Strategis OPD : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi  
 Urusan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Pemerintahan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Pelaksanaan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak sesuai kebutuhan	ROO.24.35.04.01	Inspektur/ Sekretaris	Kurang tertibnya alur pelaporan pegawai kepada Bendahara Gaji terkait status tunjangan anak, kenaikan pangkat maupun kenaikan berkala	internal	C	Anggaran yang tersedia melebihi/kurang dari kebutuhan	Inspektur/ Sekretaris
1	<b>Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Pelaksanaan	Terjadi kekurangan anggaran pembayaran gaji & tunjangan ASN	ROO.24.35.04.02	Inspektur/ Sekretaris	1. Bendahara gaji kurang cermat dalam menyusun perhitungan kebutuhan gaji 2. Terdapat pegawai mutasi	internal	C	Terlambatnya proses pembayaran gaji ASN	Inspektur/ Sekretaris
			Pelaksanaan	Terjadi gratifikasi dalam proses penyusunan anggaran Gaji ASN	RF.24.35.04.01	Inspektur/ Sekretaris	1. Lemahnya pengawasan 2. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	internal	C	Penyusunan anggaran tidak berbasis kinerja	Inspektur/ Sekretaris
			Pertanggung jawaban	Kerugian keuangan negara akibat kurang tertibnya administrasi kepegawaian terkait gaji/ pendapatan pegawai	RF.24.35.04.02	Inspektur/ Sekretaris	Kurang tertibnya alur pelaporan pegawai kepada Bendahara Gaji terkait status tunjangan anak	internal	C	Terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan rutin	Inspektur/ Sekretaris
2	<b>Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Cakupan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pelaksanaan	Benturan kepentingan pelaksanaan diklat masing-masing APIP	ROO.24.35.04.03	Inspektur/ Sekretaris/ Irban	Adanya hal-hal tidak terduga (upacara agama, hal lainnya) yang dialami APIP	internal	C	Tidak sesuai rencana diklat dengan realisasi diklat	Inspektur/ Sekretaris/ Irban
			Pelaksanaan	Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa	RF.24.35.04.03	Inspektur/ Sekretaris	Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa	internal	C	Terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan	Inspektur/ Sekretaris
			Pertanggung jawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.24.35.04.04	Inspektur/ Sekretaris	1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) untuk mendapatkan keuntungan pribadi	internal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Inspektur/ Sekretaris

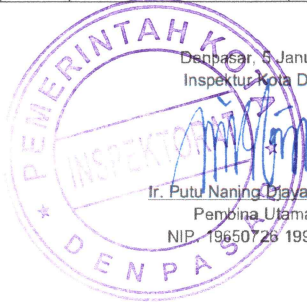

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	<b>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Perencanaan	Penyusunan anggaran barang pakai habis tidak memenuhi kebutuhan riil	ROO.24.35.04.04	Inspektur/ Sekretaris	Penyusunan kebutuhan barang pakai habis untuk tahun n+1 tidak berdasarkan pada daftar inventaris ataupun daftar stock opname	internal	C	Timbulnya praktik KKN	Inspektur/ Sekretaris
			Perencanaan	Terjadi keterlambatan pengajuan draft SK Walikota	ROO.24.35.04.05	Inspektur/ Sekretaris	Kurang mencermati timeline pekerjaan	internal	C	Tidak memiliki dasar hukum atas pekerjaan dimaksud	Inspektur/ Sekretaris
			Pelaksanaan	Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa	RF.24.35.04.05	Inspektur/ Sekretaris	Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa	internal	C	Terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan	Inspektur/ Sekretaris
			Pertanggung jawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.24.35.04.06	Inspektur/ Sekretaris	1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) untuk mendapatkan keuntungan pribadi	internal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Inspektur/ Sekretaris
4	<b>Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pelaksanaan	Benturan kepentingan dalam penetapan rekanan sebagai penyedia barang dan jasa	ROO.24.35.04.06	Inspektur/ Sekretaris	Adanya intervensi pihak tertentu dalam proses pengadaan	internal	C	Timbulnya praktik KKN	Inspektur/ Sekretaris
			Pelaksanaan	Tidak terakomodirnya rencana pengadaan barang ke dalam RKBMD	RF.24.35.04.07	Inspektur/ Sekretaris	Rencana pengadaan barang belum terekap secara menyeluruh untuk diajukan ke BPKAD	internal	C	Kegiatan pengadaan barang tidak dapat dilaksanakan sehingga menyebabkan SILPA	Inspektur/ Sekretaris
			Pertanggung jawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.24.35.04.08	Inspektur/ Sekretaris	1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) untuk mendapatkan keuntungan pribadi	internal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Inspektur/ Sekretaris
5	<b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Pelaksanaan	Peningkatan tagihan Sumber Daya Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	ROO.24.35.04.07	Inspektur/ Sekretaris	Kenaikan tarif yang tidak dapat diprediksi karena adanya kebocoran pipa ataupun kesalahan billing/pencurian kuota	internal	C	Perlunya penyesuaian anggaran	Inspektur/ Sekretaris

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan	Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa	RF.24.35.04.09	Inspektur/ Sekretaris	Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa	internal	C	Terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan	Inspektur/ Sekretaris
			Pertanggung jawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.24.35.04.10	Inspektur/ Sekretaris	1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) untuk mendapatkan keuntungan pribadi	internal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Inspektur/ Sekretaris
6	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pelaksanaan	Barang elektronik yang memerlukan perbaikan besar	ROO.24.35.04.08	Inspektur/ Sekretaris	Penggunaan barang melebihi umur ekonomis	internal	C	Terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan	Inspektur/ Sekretaris
			Pelaksanaan	Peningkatan kebutuhan belanja pemeliharaan	RF.24.35.04.11	Inspektur/ Sekretaris	Adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa	internal	C	Terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan	Inspektur/ Sekretaris
			Pertanggung jawaban	Penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi / kelompok diluar kebutuhan jabatan	RF.24.35.04.12	Inspektur/ Sekretaris	Penyalahgunaan wawasan jabatan	internal	C	Kurangnya BMD yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan dinas pada saat dibutuhkan	Inspektur/ Sekretaris
	<b>Program : Penyelenggaraan Pengawasan</b>	Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	Pelaksanaan	Level Kapabilitas APIP Inspektorat masih belum memadai	RSO.24.35.04.01	Inspektur	Kurangnya SDM APIP yang memadai dan berkompeten serta kurangnya sarana prasarana pendukung pengawasan oleh APIP	internal	C	Level Kapabilitas APIP Inspektorat menurun	Inspektur
			Pelaksanaan	Tuntutan pertahanan Level Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kota Denpasar	RSO.24.35.04.02	Inspektur	Kurangnya koordinasi, sosialisasi dan pemahaman OPD terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk belum adanya sistem berbasis teknologi yang mempermudah proses.	Internal dan Eksternal	C	Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kota Denpasar menjadi level 2	Kepala Daerah
			Pelaksanaan	Tuntutan pertahanan nilai pemenuhan MCP Kota Denpasar	RSO.24.35.04.03	Inspektur	Kurangnya koordinasi, sosialisasi dan pemahaman OPD terhadap pemenuhan area MCP.	Internal dan Eksternal	C	Tidak tercapainya nilai pemenuhan MCP Kota Denpasar minimal 80%	Kepala Daerah dan OPD terkait

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	Pelaksanaan	Persentase OPD yang jumlah temuannya minimal	ROO.24.35.04.09	Inspektur/ Irban	Ada ketidakpatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan	internal	C	Jumlah temuan yang harus dituntaskan menjadi bertambah	Inspektur/ Irban
			Pelaksanaan	Persentase OPD yang mendapat pengawasan dengan tujuan tertentu	ROO.24.35.04.10	Inspektur/ Irban	OPD kurang memahami peraturan perundang-undangan	internal	C	OPD berpotensi kena temuan dari hasil pemeriksaan APIP baik APIP internal dan eksternal	Inspektur/ Irban
			Pelaksanaan	Gratifikasi dalam rangka manipulasi jumlah temuan	RF.24.35.04.13	Inspektur/ Sekretaris	Ada ketidakpatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan	internal	C	tidak bisa mempertahankan opini WTP	Inspektur/ Irban
			Pertanggung jawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.35.04.14	Inspektur/ Sekretaris	1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) untuk mendapatkan keuntungan pribadi	internal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Inspektur/ Sekretaris
8	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Pelaksanaan	Tuntasnya OPD yang mendapat pengawasan dengan tujuan tertentu	ROO.24.35.04.11	Inspektur/ Irban	Ada ketidakpatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan	internal	C	tidak bisa mempertahankan opini WTP	Inspektur/ Irban
			Pelaksanaan	Gratifikasi dalam rangka manipulasi jumlah temuan	RF.24.35.04.15	Inspektur/ Irban	Ada ketidakpatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan	internal	C	tidak bisa mempertahankan opini WTP	Inspektur/ Irban
			Pertanggung jawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.35.04.16	Inspektur/ Sekretaris	1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) untuk mendapatkan keuntungan pribadi	internal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Inspektur/ Sekretaris
	<b>Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi)	Pelaksanaan	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP, Itprov, dan Itko tidak sesuai target.	RSO.24.35.04.04	Inspektur	Kurangnya koordinasi, pemahaman dan komitmen OPD dalam penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP, Itprov, dan Itko	Internal dan Eksternal	C	Tidak tercapainya target penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP, Itprov, dan Itko sebesar 90 %	Kepala Daerah dan OPD terkait

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan	Kurangnya kualitas Pelaksanaan Benturan Kepentingan dan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	RSO.24.35.04.05	Inspektur	Koordinasi, sosialisasi dan pemahaman OPD terhadap Pelaksanaan Benturan Kepentingan dan Gratifikasi belum optimal.	Internal dan Eksternal	C	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) menjadi rendah yang menggambarkan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi di Kota Denpasar menjadi diragukan	Kepala Daerah dan OPD terkait
			Pelaksanaan	Menurunnya Persentase OPD yang mendapatkan pendampingan Inspektorat	RSO.24.35.04.06	Inspektur	kurangnya tenaga pendamping dari Inspektorat Kota Denpasar	Internal	C	Kurang optimalnya pemenuhan dokumen serta perbaikan hasil evaluasi secara tepat waktu dan tepat sasaran.	OPD yang terkait
9	<b>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	Cakupan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan	Pelaksanaan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan pemahaman aparaturnya terhadap akuntabilitas kinerja	ROO.24.35.04.12	Inspektur/ Irban	OPD mendapatkan kendala atau belum memenuhi penuntasan temuan	internal	C	Persentase penuntasan temuan dibawah 80%	Inspektur/ Irban
			Pelaksanaan	Gratifikasi dalam rangka manipulasi jumlah temuan	RF.24.35.04.17	Inspektur/ Irban	Ada ketidakpatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan	internal	C	tidak bisa mempertahankan opini WTP	Inspektur/ Irban
			Pertanggung jawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.35.04.18	Inspektur/ Sekretaris	1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) untuk mendapatkan keuntungan pribadi	internal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Inspektur/ Sekretaris
10	<b>Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi</b>	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	Pelaksanaan	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan OPD sesuai peraturan perundang-undangan	ROO.24.35.04.13	Inspektur/ Sekretaris/ Irban	Tidak seimbang antara tenaga pendamping dengan jumlah OPD yang mohon pendampingan	internal	C	Level Maturitas SPIP menurun	Inspektur/ Sekretaris/ Irban
			Pelaksanaan	Persentase OPD yang didampingi/ yang mendapat pendampingan	ROO.24.35.04.14	Inspektur/ Sekretaris/ Irban	Masa Pensiun, Rotasi dan Mutasi ASN APIP	internal	C	Level kapabilitas APIP menurun	Inspektur/ Sekretaris/ Irban
			Pelaksanaan	Gratifikasi dalam rangka manipulasi jumlah temuan	RF.24.35.04.19	Inspektur/ Irban	Ada ketidakpatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan	internal	C	tidak bisa mempertahankan opini WTP	Inspektur/ Irban

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pertanggung jawaban	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.35.04.20	Inspektur/ Sekretaris	1) lemahnya pengawasan 2) lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3) untuk mendapatkan keuntungan pribadi	internal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Inspektur/ Sekretaris


  
 Denpasar, 5 Januari 2024  
 Inspektur Kota Denpasar  
  
 Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650726 199201 2 001

Form 4  
Hasil Analisis Risiko

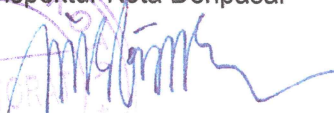
Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian	: 2024				
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik				
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Pemerintahan				
Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
1	2	3	4	5	6=4x5
I	Risiko Strategis Pemda				
1	Tuntutan Penguatan dan Peningkatan Kapabilitas APiP Pemerintah Kota Denpasar lebih optimal	RSP.24.35.04.01	4	4	16
2	Tuntutan Penyelenggaraan SPIIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang lebih efektif	RSP.24.35.04.02	4	4	16
3	Tuntutan untuk mempertahankan Opini BPK (WTP) terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar	RSP.24.35.04.03	4	4	16
4	Tuntutan Predikat Reformasi Birokrasi OPD di Pemerintah Kota Denpasar	RSP.24.35.04.04	4	4	16
5	Pelaksanaan SAKIP di lingkup Pemerintah Kota Denpasar belum baik	RSP.24.35.04.05	4	4	16
6	Tuntutan untuk menurunkan temuan Pemerintah Kota Denpasar	RSP.24.35.04.06	4	4	16
II	Risiko Strategis OPD				
1	Kurangnya kualitas Pelaksanaan Benturan Kepentingan dan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	RSO.24.35.04.05	3	3	9
2	Menurunnya Persentase OPD yang mendapatkan pendampingan Inspektorat	RSO.24.35.04.06	3	3	9

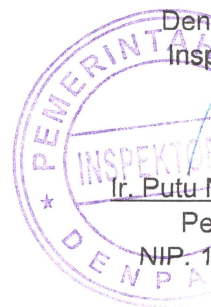
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
1	2	3	4	5	6=4x5
3	Tuntutan Penguatan dan Pertahanan Level Kapabilitas APIP Inspektorat	RSO.24.35.04.01	3	1	3
4	Tuntutan pertahanan Level Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kota Denpasar	RSO.24.35.04.02	2	1	2
5	Tuntutan pertahanan nilai pemenuhan MCP Kota Denpasar	RSO.24.35.04.03	2	1	2
6	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP, Itprov, dan Itko tidak sesuai target.	RSO.24.35.04.04	2	1	2
II	Risiko Operasional OPD				
1	Benturan kepentingan dalam penetapan rekanan sebagai penyedia barang dan jasa	ROO.24.35.04.06	3	3	9
2	Tidak terakomodirnya rencana pengadaan barang ke dalam RKBMD	RF.24.35.04.07	3	3	9
3	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.24.35.04.08	3	3	9
4	Barang elektronik yang memerlukan perbaikan besar	ROO.24.35.04.08	3	3	9
5	Peningkatan kebutuhan belanja pemeliharaan	RF.24.35.04.11	3	3	9
6	Penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi / kelompok diluar kebutuhan jabatan	RF.24.35.04.12	3	3	9
7	Terjadi keterlambatan pengajuan draft SK Walikota	ROO.24.35.04.05	3	2	6
8	Kerugian keuangan negara akibat kurang tertibnya administrasi kepegawaian terkait gaji/ pendapatan pegawai	RF.24.35.04.02	3	1	3
9	Benturan kepentingan pelaksanaan diklat masing-masing APIP	ROO.24.35.04.03	3	1	3

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
1	2	3	4	5	6=4x5
10	Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa	RF.24.35.04.03	3	1	3
11	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.24.35.04.04	3	1	3
12	Persentase OPD yang mendapat pengawasan dengan tujuan tertentu	ROO.24.35.04.10	3	1	3
13	Gratifikasi dalam rangka manipulasi jumlah temuan	RF.24.35.04.13	3	1	3
14	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.35.04.14	3	1	3
15	Tuntasnya OPD yang mendapat pengawasan dengan tujuan tertentu	ROO.24.35.04.11	3	1	3
16	Gratifikasi dalam rangka manipulasi jumlah temuan	RF.24.35.04.15	3	1	3
17	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.35.04.16	3	1	3
18	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan pemahaman aparaturnya terhadap akuntabilitas kinerja	ROO.24.35.04.12	3	1	3
19	Gratifikasi dalam rangka manipulasi jumlah temuan	RF.24.35.04.17	3	1	3
20	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.24.35.04.18	3	1	3
21	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan OPD sesuai peraturan perundang-undangan	ROO.24.35.04.13	3	1	3
22	Persentase OPD yang didampingi/ yang mendapat pendampingan	ROO.24.35.04.14	3	1	3
23	Gratifikasi dalam rangka manipulasi jumlah temuan	RF.24.35.04.19	3	1	3

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
1	2	3	4	5	6=4x5
27	Terjadi gratifikasi dalam proses penyusunan anggaran Gaji ASN	RF.24.35.04.01	2	1	2
28	Penyusunan anggaran barang pakai habis tidak memenuhi kebutuhan riil	ROO.24.35.04.04	2	1	2
29	Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa	RF.24.35.04.05	2	1	2
30	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.24.35.04.06	2	1	2
31	Peningkatan tagihan Sumber Daya Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	ROO.24.35.04.07	2	1	2
32	Benturan kepentingan dalam proses penetapan penyedia barang dan jasa	RF.24.35.04.09	2	1	2
33	Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.24.35.04.10	2	1	2
34	Persentase OPD yang jumlah temuannya minimal	ROO.24.35.04.09	2	1	2

Denpasar, 5 Januari 2024  
Inspektur Kota Denpasar

  
Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650726 199201 2 001



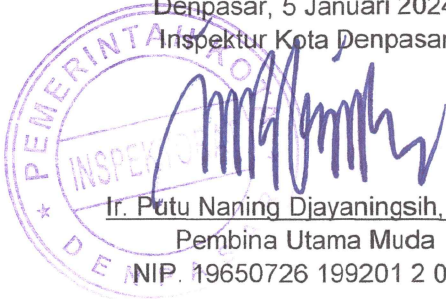
Form 5  
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian		: 2024				
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
Urusan Pemerintahan		: Unsur Pengawasan Pemerintahan				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
I	Risiko Strategis Pemda					
1	Tuntutan Penguatan dan Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Denpasar lebih optimal	RSP.24.35.04.01	16	Kepala Daerah	Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran penguatan Kapabilitas APIP termasuk sarana dan prasarana pendukung belum optimal	Level Kapabilitas APIP menjadi di level 2
2	Tuntutan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang lebih efektif	RSP.24.35.04.02	16	Kepala Daerah	Kurangnya koordinasi, sosialisasi dan pemahaman OPD terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP tidak bisa mempertahankan level 3
3	Tuntutan untuk mempertahankan Opini BPK (WTP) terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar	RSP.24.35.04.03	16	Kepala Daerah	Adanya faktor-faktor indikasi terjadinya fraud yang terjadi pada proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Opini BPK (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar tidak bisa dipertahankan
4	Menurunnya Predikat Reformasi Birokrasi OPD di Pemerintah Kota Denpasar	RSP.24.35.04.04	16	Kepala Daerah	Masih ada program kerja pada OPD yang belum tepat sasaran, belum inovatif dan kreatif serta adaptif terhadap perubahan di dalam melakukan pelayanan publik.	Tidak bisa dipertahankan Predikat Reformasi Birokrasi minimal BB di Pemerintah Kota Denpasar

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	2	3	4	5	6	7
5	Pelaksanaan SAKIP di lingkup Pemerintah Kota Denpasar belum baik	RSP.24.35.04.05	16	Kepala Daerah	Kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara belum optimal	Tidak tercapainya hasil evaluasi SAKIP minimal A
6	Tuntutan untuk menurunkan temuan Pemerintah Kota Denpasar	RSP.24.35.04.06	16	Kepala Daerah	Kurangnya pendampingan dari Inspektorat untuk mencegah terjadinya temuan pada OPD binaan	Tingkat kepatuhan atas perundang-undangan yang berlaku masih rendah
II	Risiko Strategis OPD					
<b>NIHIL (tidak ada risiko yang diatas selera risiko)</b>						
II	Risiko Operasional OPD					
<b>NIHIL (tidak ada risiko yang diatas selera risiko)</b>						

Denpasar, 5 Januari 2024

Inspektur Kota Denpasar



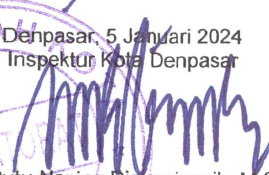
Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650726 199201 2 001

Form 7  
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan  
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)


Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2024					
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
Urusan Pemerintahan		: Unsur Pengawasan Pemerintahan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Risiko Strategis Pemda						
1	Tuntutan Penguatan dan Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Denpasar lebih optimal	RSP.24.35.04.01	Melakukan Pelatihan dalam rangka penilaian Kapabilitas APIP dengan mengundang Narasumber dari BPKP	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pelatihan baik daring ataupun luring untuk memaksimalkan kapabilitas APIP dan mempertahankan Level Kapabilitas APIP	Kepala Daerah	1 Tahun
2	Tuntutan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang lebih efektif	RSP.24.35.04.02	Melaksanakan Pelatihan SPIP melalui daring dengan Narasumber dari BPKP	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pelatihan/pembinaan penyelenggaraan SPIP secara daring ataupun luring serta pengawasan dan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas evaluasi penyelenggaraan SPIP	Kepala Daerah	1 Tahun
3	Tuntutan untuk mempertahankan Opini BPK (WTP) terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar	RSP.24.35.04.03	Terlaksananya reuiu LKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan.	Kepala Daerah	1 Tahun
4	Menurunnya Predikat Reformasi Birokrasi OPD di Pemerintah Kota Denpasar	RSP.24.35.04.04	Terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi.	Kepala Daerah	1 Tahun
5	Pelaksanaan SAKIP di lingkup Pemerintah Kota Denpasar belum baik	RSP.24.35.04.05	Terlaksananya Penilaian, Monitoring dan Evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka pemenuhan dokumen SAKIP.	Kepala Daerah	1 Tahun

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
6	Tuntutan untuk menurunkan temuan Pemerintah Kota Denpasar	RSP.24.35.04.06	Melakukan Reviu, Monitoring dan Evaluasi serta, Pendampingan kepada OPD binaan	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memaksimalkan pelaksanaan <i>consulting</i> dan <i>assurance</i> kepada OPD binaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kepala Daerah	1 Tahun
<b>NIHIL (tidak ada risiko yang diatas selera risiko)</b>							
II	Risiko Strategis OPD						
<b>NIHIL (tidak ada risiko yang diatas selera risiko)</b>							
II	Risiko Operasional OPD						
<b>NIHIL (tidak ada risiko yang diatas selera risiko)</b>							

Denpasar, 5 Januari 2024  
 Inspektur Kota Denpasar



Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650726 199201 2 001



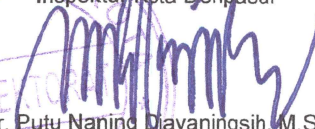
## Form 8

## RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN

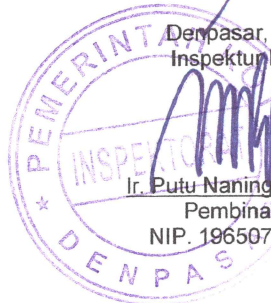
Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar : 2024 : Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik : Unsur Pengawasan Pemerintahan					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>I Risiko Strategis Pemda</b>							
1	Tuntutan Penguatan dan Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Denpasar lebih optimal	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Inspektorat Kota Denpasar, BPKP Perwakilan Provinsi Bali	Pemerintah Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumen berupa pemenuhan penilaian kapabilitas APIP
2	Tuntutan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang lebih efektif	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Inspektorat Kota Denpasar, BPKP Perwakilan Provinsi Bali	Perangkat Daerah Terkait	1 Tahun	1 Tahun	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumen berupa pemenuhan dokumen SPIP
3	Tuntutan untuk mempertahankan Opini BPK (WTP) terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Inspektorat Kota Denpasar, BPK RI	Perangkat Daerah Terkait	1 Tahun	1 Tahun	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumen berupa laporan LHP BPK Perwakilan Provinsi Bali
4	Menurunnya Predikat Reformasi Birokrasi OPD di Pemerintah Kota Denpasar	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Inspektorat Kota Denpasar, MENPAN RB	Perangkat Daerah Terkait	1 Tahun	1 Tahun	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumen berupa pemenuhan dokumen RB

No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
5	Pelaksanaan SAKIP di lingkup Pemerintah Kota Denpasar belum baik	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Inspektorat Kota Denpasar, MENPAN RB	Perangkat Daerah Terkait	1 Tahun	1 Tahun	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumen berupa pemenuhan dokumen SAKIP
6	Tuntutan untuk menurunkan temuan Pemerintah Kota Denpasar	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Inspektorat Kota Denpasar, Inspektorat Provinsi Bali, BPK, BPKP	Perangkat Daerah Terkait	1 Tahun	1 Tahun	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumen berupa Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Hasil Reviu (LHR), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
II	<b>Risiko Strategis OPD</b>						
	Nama OPD : Inspektorat						
	<b>NIHIL (tidak ada risiko yang diatas selera risiko)</b>						
III	<b>Risiko Operasional OPD</b>						
	Nama OPD : Inspektorat						
	<b>NIHIL (tidak ada risiko yang diatas selera risiko)</b>						

Denpasar, 5 Januari 2024  
 Inspektur Kota Denpasar



Ir. Putu Naning Jayaningsih, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650726 199201 2 001



## Form 9

## RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian	: 2024					
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik					
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pengawasan Pemerintahan					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Tuntutan Penguatan dan Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Denpasar lebih optimal	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kegiatan telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
2	Tuntutan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang lebih efektif	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kegiatan telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
3	Tuntutan untuk mempertahankan Opini BPK (WTP) terhadap laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar	1. Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kegiatan telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan

No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
4	Menurunnya Predikat Reformasi Birokrasi OPD di Pemerintah Kota Denpasar	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kegiatan telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
5	Pelaksanaan SAKIP di lingkup Pemerintah Kota Denpasar belum baik	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kegiatan telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan
6	Tuntutan untuk menurunkan temuan Pemerintah Kota Denpasar	1 Aturan/Kebijakan 2. Surat Keputusan 3. Surat Undangan 4. Pelaksanaan Kegiatan	Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kegiatan telah dilaksanakan, didokumentasikan dan didistribusikan

Denpasar, 5 Januari 2024  
Inspektur Kota Denpasar



INSPEKTUR KOTA DENPASAR

Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650726 199201 2 001

Form 10

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Denpasar  
 Tahun Penilaian : 2024  
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik  
 Urusan Pemerintahan : Unsur Pengawasan Pemerintahan

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I	Risiko Strategis Pemda									
1	NIHIL									
II	Risiko Strategis OPD									
1	NIHIL									
III	Risiko Operasional OPD									
1	NIHIL									

Denpasar, 5 Januari 2024  
 Inspektur Kota Denpasar



INSPEKTUR KOTA DENPASAR

Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 INIP. 19650726 199201 2 001